

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting pada program pembangunan nasional. Sektor pertanian terbukti dapat bertahan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan membantu meningkatkan perekonomian negara saat pandemi covid-19. Tahun 2020 dalam kondisi pandemi covid-19 Sektor pertanian masih mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif, laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara luas (termasuk kehutanan dan perikanan) meningkat sebesar 1,77% dan tahun 2021 sebesar 1,84%. Demikian pula PDB pertanian sempit meningkat 2,13%, dan tahun 2021 sebesar 1,08%. Perkembangan PDB sektor pertanian luas atas dasar harga berlaku tahun 2018 sebesar Rp 1.900,6 triliun meningkat menjadi Rp 2.253,8 triliun pada tahun 2021. Kondisi demikian juga terjadi di sektor pertanian sempit, yaitu tahun 2018 sebesar Rp 1.417,3 triliun menjadi Rp 1.672,3 triliun di tahun 2021.(Kementerian Pertanian, 2022)

Kebijakan pertanian Indonesia memiliki tujuan utama untuk memajukan pertanian, meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani agar kehidupan petani menjadi sejahtera. (Undang-Undang 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan, 2006) menyatakan bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan. Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial,

kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; bahwa untuk mewujudkan semua itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;

Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian “Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani“. Hal ini sejalan dengan Revitalisasi Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Indraningsih et al., 2013) menyatakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dimaksudkan untuk mendukung dan memberdayakan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan pertanian. Sistem penyuluhan pertanian perlu dikembangkan untuk senantiasa meningkatkan peran penyuluh Pertanian, kehutanan dan Perikanan khususnya pada pengamanan Pangan. Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Revitalisasi Pertanian diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang mandiri, berjiwa usaha, berdedikasi, profesional, kreatif, inovatif dan kredibel untuk dapat mendukung sistem agribisnis yang berbasis Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan dan Perikanan.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu diciptakan dan dikembangkan melalui sistem penyuluhan pertanian yang mampu memberdayakan petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya melalui sistem pendidikan non formal, melalui pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan oleh para penyuluh Pertanian, kehutanan dan Perikanan. (Anwarudin *et.al.*, 2021). Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini petani. Agar tujuan penyuluhan dapat tercapai maka diharapkan sumberdaya manusia penyuluhan ini memiliki kualitas yang baik yang ditunjukkan dengan kinerja yang baik pula. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan melalui individu penyuluh dan melalui organisasi penyuluhan tersebut. (Hutapea, 2012).

Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya meningkatkan pemberdayaan pelaku utama, produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Penyuluh Pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien, sangat diperlukan dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia pertanian yang berkualitas dan handal (Wibowo dan Haryanto, 2020)

Kinerja penyuluh pertanian dirasakan mulai menurun sejak berlakunya otonomi daerah. Pada awalnya penyuluh pertanian merupakan aparat pusat yang bekerja di daerah untuk membantu petani di perdesaan. Setelah mengalami perubahan bentuk kelembagaan dengan adanya otonomi daerah, maka saat ini penyuluh pertanian yang langsung membina petani merupakan aparat pemerintah daerah. Beberapa daerah tingkat II menganggap bahwa penyuluh pertanian tidak penting karena tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Amelia & Dewi, 2020). (Hutapea, 2012) menyatakan .Kinerja Penyuluhan pertanian saat ini dirasakan menurun, karena masih kurangnya kedisiplinan penyuluh dalam melaksanakan kewajibannya serta tugas pokok dan fungsi penyuluh. Penelitian yang dilakukan (Hernanda et al., 2015) pada tahun 2015 menyatakan bahwa Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten OKU Selatan masuk kategori cukup baik, yang didukung oleh kemampuan penyuluh dalam melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan. Tetapi dari kegiatan evaluasi penyuluhan terdapat kekurangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi penyuluh secara berkelanjutan.

Tahun 2024, jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, total 189 Orang yang terdiri dari Penyuluh PNS 50 orang, PPPK 25 orang, THL-TBPP 1 orang dan PPEP 113 Jumlah tenaga penyuluh pertanian PPEP adalah yang terbanyak yaitu 113 orang yang terdiri dari 2 angkatan. Angkatan 1 sebanyak 69 orang dan angkatan 2 sebanyak 44 orang. .Beban tugas penyuluh, yaitu satu penyuluh membina 1-3 desa, yang terdiri dari 19 Kecamatan

dan 252 Desa. Kegiatan penyuluhan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saat ini di Dinas Pertanian dan dibawah oleh Bidang Penyuluhan. Jumlah penyuluh pertanian di masing masing kecamatan dapat di lihat pada tabell.

Tabel 1.1. Jumlah penyuluh pertanian perkecamatan di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024

NO	Kecamatan	Penyuluh (Orang)				Total
		PNS	PPPK	THL-TBPP	PPEP	
1	Mekakau Ilir	2	1		7	10
2	Banding Agung	3	1		6	10
3	Warkuk Ranau Selatan	3			3	6
4	BPR Ranau Tengah	2	2		8	12
5	Buay Pemaca	5	1		10	16
6	Simpang	4	1		2	7
7	Buana Pemaca	5	1		2	8
8	Muaradua	5			8	13
9	Buay Rawan	8			4	12
10	Buay Sandang Aji	2	2		8	12
11	Tigadihaji	4			4	8
12	Buay Runjung		1		4	5
13	Rujung Agung		2		2	4
14	Kisam Tinggi	1	1	1	9	12
15	Muaradua Kisam	3	2		12	17
16	Kisam Ilir		1		6	7
17	Pulau Beringin	2	5		7	14
18	Sindang Danau	1	1		5	7
19	Sungai Are		3		6	9
Jumlah		50	25	1	113	189

Sumber: Data KJF Kabupaten OKU Selatan (2024).

Penyuluh pertanian di Kabupaten OKU Selatan semakin bertambah terlihat dari tabel jumlah penyuluh pertanian tersebut, dengan bertambahnya jumlah penyuluh diharapkan akan semakin meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu mencapai sasaran untuk membantu para petani dalam transfer ilmu dan teknologi berkaitan dengan budidaya tanaman. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan pendapatan petani. Pengkajian ulang dan penelitian lebih lanjut mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian diperlukan agar kinerja penyuluh pertanian dapat lebih meningkat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Pertanian dan menyelesaikan studi pada program pasca sarjana Universitas Baturaja.
2. Bagi penyuluh pertanian diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
3. Bagi instansi terkait diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai pertimbangan untuk pengambil kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.